



Desentralisasi dan Tantangan Otonomi Daerah: Analisis Kebijakan dengan Pendekatan Mixed-Method

Nur Hasanah*¹, Erwin Syah², Kristia Ningsih³

¹Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, E-mail: nurhasanah@pks.edu

²Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia,

E-mail: erwinsyah.rr13@gmail.com

³Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung, Bandung, Jawa Barat, Indonesia, E-mail: kristianii02@gmail.com

Article Info	Abstract
Keywords: Decentralization Fiscal Disparities Regional Governance Corruption Policy Reform	<i>Decentralization has been implemented in Indonesia as a strategy to enhance regional governance and foster local development. However, despite its potential benefits, decentralization faces significant challenges, including fiscal disparities, administrative inefficiencies, and corruption at the regional level. Unequal revenue distribution among regions has resulted in dependency on central government transfers, while limited administrative capacity has hindered effective policy implementation. This study aims to evaluate the effectiveness of decentralization policies in Indonesia using a mixed-method approach that combines quantitative analysis of financial reports and regional governance indicators with qualitative insights from interviews with policymakers and public administration experts. The findings reveal that regional budget realization improved from 68% in 2018 to 72% in 2023, while the Regional Governance Performance Index (IPKD) increased from 60% to 70% during the same period. However, fiscal dependency remains a major issue, with 80% of regional revenues still relying on central government transfers. Additionally, corruption cases involving local officials increased from 110 in 2018 to 160 in 2023, highlighting governance weaknesses and the lack of transparency. These findings indicate that decentralization in Indonesia has yet to fully achieve its objectives due to structural and institutional challenges. This study contributes to the ongoing discourse on decentralization by identifying key constraints and proposing policy recommendations, including strengthening fiscal autonomy, enhancing transparency through digital governance, and improving administrative capacity. A more structured, transparent, and accountable decentralization framework is essential to ensure sustainable and equitable regional development in Indonesia.</i>

DOI: [10.51903/perkara.v3i1.2333](https://doi.org/10.51903/perkara.v3i1.2333)

Submitted: January 2025, Reviewed: January 2025, Accepted: February 2025

*Corresponding Author

I. INTRODUCTION

Desentralisasi merupakan strategi yang banyak diterapkan oleh negara-negara di dunia untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan daerah dan mendorong pembangunan berbasis lokal. Menurut data Bank Dunia, lebih dari 80 negara telah mengadopsi kebijakan desentralisasi dalam berbagai bentuk, dengan tujuan utama meningkatkan efisiensi pelayanan publik serta memperkuat partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan. Di Indonesia, desentralisasi dimulai secara resmi dengan diterapkannya

Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 yang kemudian diperbarui menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 2014. Reformasi ini bertujuan untuk memberikan kewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya dan kebijakan lokalnya. Namun, implementasi kebijakan ini menghadapi tantangan yang signifikan, termasuk ketimpangan fiskal antarwilayah, lemahnya kapasitas administratif, dan maraknya praktik korupsi di tingkat daerah. Sebagai contoh, menurut laporan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2023, sekitar 70% dari total kasus korupsi yang ditangani melibatkan pejabat pemerintah daerah. Kasus ini menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya mampu meningkatkan tata kelola yang baik di daerah, melainkan justru menciptakan risiko baru dalam sistem pemerintahan.

Salah satu permasalahan utama dalam implementasi desentralisasi di Indonesia adalah ketimpangan fiskal yang masih tinggi, yang berdampak pada ketidakmerataan pembangunan antar daerah. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Digidowiseiso et al., 2022), ketimpangan fiskal di negara-negara berkembang sering kali disebabkan oleh keterbatasan kapasitas pemerintah daerah dalam mengelola sumber pendapatan sendiri, sehingga bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Hal ini juga terlihat di Indonesia, di mana menurut data Kementerian Keuangan tahun 2023, sekitar 80% pendapatan daerah masih bergantung pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), yang sering kali tidak proporsional dengan kebutuhan riil di daerah tersebut. Studi oleh (Tang et al., 2024) menemukan bahwa daerah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi cenderung memiliki tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang rendah, yang berdampak pada lambatnya realisasi proyek infrastruktur dan rendahnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik. Sebagai contoh, Indeks Kepuasan Publik terhadap layanan daerah di Indonesia hanya mencapai 62% pada tahun 2021, yang menunjukkan masih adanya kesenjangan dalam penyediaan layanan dasar, seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Ketimpangan fiskal ini juga memperburuk kesenjangan pembangunan antarwilayah, di mana daerah-daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) rendah mengalami keterbatasan dalam meningkatkan kualitas layanan publik dan daya saing ekonomi lokal.

Beberapa penelitian terkait efektivitas kebijakan desentralisasi menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi desentralisasi sangat bergantung pada kapasitas fiskal dan administratif pemerintah daerah. (Del Campo & Reinón, 2023) menemukan bahwa desentralisasi di Bolivia meningkatkan efisiensi alokasi sumber daya dan memperkuat akuntabilitas pemerintah daerah. Sementara itu, penelitian (Setiawan et al., 2022) menyoroti bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas lokal dapat menyebabkan ketimpangan ekonomi antarwilayah. (Savitri & Tjenreng, 2025) membahas bagaimana ketidakseimbangan fiskal dalam desentralisasi dapat memperburuk korupsi di tingkat lokal, terutama di daerah dengan sistem pengawasan yang lemah. Studi oleh (Shrestha et al., 2023) menunjukkan bahwa desentralisasi di beberapa negara berkembang sering kali dikaitkan dengan peningkatan kasus korupsi di daerah, karena lemahnya mekanisme pengawasan terhadap pemerintah daerah. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian (Wadipalapa et al., 2024), yang menunjukkan bahwa

desentralisasi di Indonesia memberikan peluang lebih besar bagi elite politik lokal untuk mengontrol sumber daya daerah, yang dapat menghambat transparansi dan akuntabilitas pemerintahan.

Penelitian lain menyoroti pentingnya kapasitas administratif dalam menentukan efektivitas kebijakan desentralisasi. (Aritenang & Chandramidi, 2022) menemukan bahwa keberhasilan desentralisasi di beberapa daerah di Indonesia dipengaruhi oleh kapasitas birokrasi dalam mengelola anggaran daerah dan melaksanakan kebijakan secara efektif. Penelitian oleh (Getahun et al., 2025) menegaskan bahwa lemahnya kapasitas aparatur daerah menjadi salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakefisienan dalam pengelolaan anggaran dan rendahnya kualitas layanan publik. Studi (Annahar et al., 2023) menunjukkan bahwa daerah dengan aparatur pemerintahan yang memiliki kompetensi tinggi cenderung lebih berhasil dalam mengimplementasikan kebijakan desentralisasi dibandingkan daerah dengan kapasitas SDM yang terbatas. (Kalogiannidis et al., 2024) juga menemukan bahwa rendahnya kapasitas pemerintah daerah dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran dapat menghambat efektivitas pembangunan daerah. (Onofrei et al., 2022) menegaskan bahwa salah satu tantangan utama desentralisasi adalah memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki kapasitas administratif yang memadai untuk mengelola otonomi fiskal secara optimal.

Selain aspek fiskal dan administratif, penelitian lain meneliti bagaimana desentralisasi memengaruhi kualitas layanan publik. (Yokogawa, 2024) menemukan bahwa daerah yang lebih mandiri secara fiskal cenderung memiliki kualitas layanan publik yang lebih baik dibandingkan daerah yang sangat bergantung pada transfer dana dari pemerintah pusat. Studi oleh (Engdaw, 2022) menunjukkan bahwa efektivitas layanan publik dalam sistem desentralisasi dipengaruhi oleh mekanisme akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan kebijakan daerah. Penelitian (Sunmola & Burgess, 2022) menemukan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan inovasi dalam penyediaan layanan publik jika disertai dengan penguatan sistem pengawasan dan transparansi. Studi (Styrin et al., 2022) menyoroti bahwa ketimpangan dalam kapasitas keuangan daerah menyebabkan perbedaan signifikan dalam kualitas layanan publik antarwilayah. Hasil serupa ditemukan dalam penelitian (Faguet, 2022), yang menunjukkan bahwa tanpa mekanisme tata kelola yang baik, desentralisasi dapat memperburuk ketimpangan dalam akses terhadap layanan dasar, terutama di daerah tertinggal.

Meskipun penelitian sebelumnya telah membahas berbagai aspek desentralisasi, masih terdapat kesenjangan dalam memahami bagaimana kebijakan ini secara spesifik memengaruhi efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. (Li & Guo, 2022) menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi belum banyak penelitian yang mengukur bagaimana kebijakan ini berdampak pada kualitas layanan publik di daerah dengan tingkat ketimpangan fiskal yang tinggi. (Silitonga et al., 2023) mengkaji hubungan antara desentralisasi dan korupsi, tetapi tidak secara mendalam membahas variasi dampaknya antar daerah dengan karakteristik yang berbeda. Studi oleh (Mendez & Bachtler, 2024) menyoroti pentingnya kapasitas administratif dalam keberhasilan desentralisasi, namun masih minim penelitian yang menghubungkan aspek tersebut dengan transparansi

dan efektivitas kebijakan fiskal di daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya. (Hung & Thanh, 2022) berfokus pada dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi regional, tetapi belum banyak kajian yang meneliti bagaimana kebijakan ini memengaruhi pemerataan pembangunan antar wilayah di Indonesia. (Balisany et al., 2022) menyoroti risiko meningkatnya korupsi akibat desentralisasi, tetapi kurang memperhitungkan bagaimana faktor pengawasan dan akuntabilitas dapat memitigasi risiko tersebut dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.

Selain itu, masih sedikit penelitian yang menggunakan pendekatan mixed-method untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi secara komprehensif. (Kesale et al., 2022) mengkaji dampak desentralisasi terhadap kepuasan masyarakat, tetapi tidak memasukkan analisis kuantitatif mengenai kinerja keuangan daerah. Studi oleh (Xia et al., 2022) meneliti efektivitas pengelolaan anggaran daerah, tetapi belum mengeksplorasi lebih jauh bagaimana perbedaan kapasitas fiskal antar wilayah berpengaruh terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi. (Rodríguez-pose, 2022) menyoroti peran kapasitas SDM dalam keberhasilan desentralisasi, namun belum banyak penelitian yang menganalisis bagaimana faktor ini berinteraksi dengan kebijakan fiskal dan tata kelola pemerintahan daerah. (Xu, 2022) membahas tantangan implementasi desentralisasi di daerah dengan kapasitas pemerintahan yang lemah, tetapi masih terbatas kajian yang menghubungkan aspek tersebut dengan efektivitas kebijakan publik daerah. (Miranda-Lescano et al., 2024) meneliti efektivitas tata kelola fiskal dalam sistem desentralisasi, tetapi masih kurang penelitian yang mengidentifikasi model kebijakan yang dapat meningkatkan transparansi dan efisiensi pengelolaan keuangan daerah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, mengidentifikasi tantangan utama yang dihadapi dalam implementasi otonomi daerah, serta menyusun rekomendasi kebijakan yang dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan mixed-method, penelitian ini akan menguji hipotesis bahwa desentralisasi yang didukung oleh kapasitas fiskal dan administratif yang kuat dapat meningkatkan efisiensi layanan publik serta memperkuat akuntabilitas pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menjawab pertanyaan utama mengenai sejauh mana desentralisasi telah berhasil mengurangi ketimpangan pembangunan antarwilayah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui analisis data kuantitatif dan wawancara kualitatif, penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi tantangan utama yang masih dihadapi dalam implementasi otonomi daerah serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilannya. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perumusan kebijakan yang lebih efektif dalam mendorong transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Dengan demikian, rekomendasi yang dihasilkan dapat digunakan sebagai

landasan bagi pemerintah dalam merancang strategi desentralisasi yang lebih berkelanjutan dan responsif terhadap kebutuhan lokal.

II. METHODOLOGY

A. Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan mixed-method, yaitu kombinasi antara metode kuantitatif dan kualitatif untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Pendekatan kuantitatif dilakukan dengan menganalisis data sekunder, seperti laporan keuangan daerah, Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IPKD), serta tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan publik daerah. Data ini digunakan untuk mengukur dampak kebijakan desentralisasi terhadap efektivitas pengelolaan anggaran, efisiensi pelayanan publik, serta kesejahteraan masyarakat di tingkat daerah. Sementara itu, pendekatan kualitatif dilakukan melalui wawancara mendalam dengan pejabat daerah, akademisi, serta pakar kebijakan publik guna memahami tantangan yang dihadapi dalam implementasi desentralisasi. Wawancara ini bertujuan untuk menggali lebih dalam aspek-aspek yang tidak dapat dijelaskan sepenuhnya melalui data kuantitatif, seperti faktor politik, birokrasi, dan kapasitas administratif dalam pelaksanaan kebijakan desentralisasi. Studi kasus juga diterapkan pada beberapa daerah dengan tingkat keberhasilan desentralisasi yang berbeda untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas kebijakan. Analisis perbandingan antar daerah dalam studi kasus ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap keberhasilan atau hambatan dalam pelaksanaan desentralisasi di berbagai konteks lokal.

B. Populasi dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini mencakup seluruh pemerintah daerah di Indonesia, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, yang telah menerapkan kebijakan desentralisasi sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling, dengan mempertimbangkan keberagaman karakteristik daerah berdasarkan tingkat kemandirian fiskal, kinerja pemerintahan, dan penerapan tata kelola yang baik. Proses pemilihan sampel ini dilakukan agar penelitian dapat mencerminkan variasi kondisi di berbagai daerah serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kendala dalam pelaksanaan desentralisasi. Sampel dalam penelitian ini terdiri dari berbagai sumber data yang dapat memberikan gambaran menyeluruh mengenai implementasi kebijakan desentralisasi di Indonesia. Dokumen regulasi yang dianalisis meliputi Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kebijakan fiskal daerah, serta laporan evaluasi kinerja pemerintah daerah, yang digunakan untuk memahami dasar hukum dan regulasi yang mengatur desentralisasi. Selain itu, data kuantitatif seperti indikator desentralisasi, dana transfer ke daerah, realisasi APBD, serta tingkat kepuasan publik dikumpulkan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan dari sudut pandang angka dan tren statistik. Responden wawancara dalam penelitian ini mencakup pejabat daerah, akademisi, serta pakar kebijakan yang memiliki pemahaman mendalam

mengenai pelaksanaan desentralisasi di lapangan. Rincian mengenai sumber data yang digunakan dalam penelitian ini disajikan dalam Tabel 1, yang merangkum kategori data yang dikumpulkan beserta sumbernya, sehingga memberikan gambaran sistematis mengenai pendekatan penelitian yang digunakan.

Tabel 1. Sumber Data dalam Penelitian

Kategori	Sumber Data
Regulasi	UU Pemerintahan Daerah, kebijakan fiskal daerah
Kinerja	Indeks Kinerja Pemerintah Daerah (IPKD), realisasi APBD, kepuasan publik
Studi Perbandingan	Implementasi desentralisasi di negara lain

C. Prosedur Pengumpulan Data

Penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai sumber untuk memastikan hasil yang valid dan komprehensif. Data primer dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan yang terlibat langsung dalam implementasi desentralisasi, termasuk pejabat daerah, akademisi, serta pakar kebijakan publik. Wawancara ini bertujuan untuk menggali wawasan mengenai tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan desentralisasi serta peluang yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Selain itu, penelitian ini juga melakukan studi kasus terhadap beberapa daerah yang memiliki tingkat keberhasilan desentralisasi yang berbeda, sehingga memungkinkan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi terhadap kesuksesan atau hambatan dalam pelaksanaannya. Studi kasus ini mencakup aspek-aspek seperti kinerja fiskal, efisiensi penggunaan anggaran, serta dampak kebijakan terhadap pelayanan publik di tingkat daerah. Dengan menggunakan pendekatan ini, penelitian dapat memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai variasi penerapan kebijakan desentralisasi di berbagai wilayah dan bagaimana kebijakan tersebut memengaruhi tata kelola pemerintahan daerah.

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan untuk mendukung analisis dan memberikan perspektif yang lebih luas terhadap efektivitas kebijakan desentralisasi. Sumber utama data sekunder meliputi dokumen keuangan daerah, laporan APBD, serta evaluasi kinerja pemerintah daerah yang dapat memberikan gambaran tentang bagaimana kebijakan desentralisasi berdampak terhadap aspek fiskal dan administratif di tingkat daerah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan berbagai studi akademik yang meneliti implementasi desentralisasi di negara lain sebagai bahan perbandingan, sehingga memungkinkan analisis yang lebih mendalam mengenai praktik terbaik yang dapat diadopsi untuk meningkatkan efektivitas kebijakan di Indonesia. Studi akademik ini mencakup penelitian mengenai strategi desentralisasi di negara-negara dengan struktur pemerintahan yang serupa serta kebijakan yang telah terbukti berhasil dalam mengurangi ketimpangan fiskal dan meningkatkan efisiensi layanan publik. Informasi yang diperoleh dari data sekunder ini kemudian dianalisis secara kuantitatif untuk mengidentifikasi pola, tren, serta faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan desentralisasi di berbagai daerah. Rincian indikator yang digunakan dalam penelitian ini,

termasuk dana transfer ke daerah, tingkat kepuasan publik, serta indeks ketimpangan fiskal, disajikan dalam Tabel 2, yang berfungsi sebagai referensi untuk memahami perkembangan dan dampak kebijakan desentralisasi di Indonesia selama periode 2018–2023.

Tabel 2. Indikator Keberhasilan Desentralisasi di Indonesia (2018–2023)

Tahun	Dana Transfer ke Daerah (Rp Triliun)	IPKD (%)	Jumlah Kasus Korupsi Daerah	Kepuasan Publik (%)	Indeks Ketimpangan Fiskal	Realisasi APBD (%)
2018	700	60	110	55	0.50	68
2019	725	65	130	58	0.48	70
2020	750	67	116	60	0.47	71
2021	780	70	140	62	0.46	72
2022	810	72	155	65	0.45	74
2023	850	75	160	68	0.44	75

D. Instrumen Penelitian

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pedoman wawancara, checklist studi kasus, dan dokumen hukum serta regulasi. Pedoman wawancara disusun untuk menggali informasi secara mendalam mengenai efektivitas kebijakan desentralisasi, tantangan dalam implementasinya, serta dampak kebijakan tersebut terhadap tata kelola pemerintahan daerah. Checklist studi kasus dirancang untuk mengidentifikasi pola keberhasilan dan kendala yang muncul di berbagai daerah dengan memberikan kerangka kerja sistematis dalam pengumpulan data empiris. Dokumen hukum dan regulasi dianalisis guna memahami dasar-dasar legal yang mengatur kebijakan desentralisasi di Indonesia dan membandingkannya dengan praktik di negara lain. Setiap instrumen tersebut dikembangkan dengan mempertimbangkan keakuratan dan relevansi data yang akan diperoleh, sehingga menghasilkan informasi yang dapat mendukung analisis secara komprehensif. Penggunaan ketiga instrumen secara sinergis memberikan gambaran menyeluruh mengenai mekanisme pelaksanaan desentralisasi dan mendukung upaya evaluasi terhadap efektivitas kebijakan di tingkat pemerintahan daerah.

E. Prosedur Analisis Data

Data dianalisis menggunakan metode statistik deskriptif untuk data kuantitatif dan analisis tematik untuk data kualitatif. Analisis kuantitatif digunakan untuk mengevaluasi tren keuangan daerah dan indikator kinerja pemerintahan daerah berdasarkan data yang dikumpulkan dari laporan keuangan, realisasi APBD, serta indeks kepuasan publik. Pendekatan ini membantu mengidentifikasi pola pengelolaan fiskal serta efektivitas distribusi dana dalam mendukung kebijakan desentralisasi di berbagai daerah. Analisis kualitatif diterapkan dengan menggunakan teknik analisis tematik, yang memungkinkan identifikasi pola tantangan dan peluang dalam implementasi desentralisasi berdasarkan wawancara dengan pemangku kepentingan serta studi kasus di berbagai wilayah dengan karakteristik berbeda. Studi ini juga mencakup perbandingan kebijakan dengan meninjau sistem desentralisasi di negara lain guna mengidentifikasi praktik terbaik yang telah terbukti efektif dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah. Perbandingan ini dilakukan dengan mempertimbangkan aspek struktural, fiskal, serta

mekanisme pengawasan yang diterapkan di berbagai negara sebagai referensi untuk meningkatkan tata kelola desentralisasi di Indonesia. Rincian mengenai aspek yang dibandingkan dalam sistem desentralisasi berbagai negara disajikan dalam Tabel 3, yang memberikan gambaran mengenai perbedaan dalam struktur pemerintahan, sumber pendanaan daerah, serta mekanisme pengawasan yang diterapkan di beberapa negara sebagai bahan analisis dalam penelitian ini.

Tabel 3. Perbandingan Model Desentralisasi di Berbagai Negara

Aspek	Indonesia	Amerika Serikat	Jerman
Struktur Desentralisasi	Otonomi daerah berbasis undang-undang	Federalisme berbasis negara bagian	Federalisme kuat dengan subsidiaritas
Sumber Pendanaan Daerah	Dana transfer dari pusat	Pajak daerah & federal	Pajak daerah & subsidi pemerintah federal
Pengawasan Fiskal	Pemerintah pusat	Negara bagian & kongres	Pemerintah federal & daerah

F. Langkah-Langkah Pelaksanaan

Penelitian ini dilaksanakan dalam beberapa tahapan yang dirancang untuk memastikan bahwa seluruh proses berjalan secara sistematis dan sesuai dengan tujuan penelitian. Tahap pertama adalah persiapan penelitian, yang mencakup penyusunan proposal, pengumpulan literatur, serta perumusan kerangka teoritis yang akan menjadi dasar dalam menganalisis kebijakan desentralisasi. Setelah itu, dilakukan pengumpulan data melalui berbagai metode, termasuk wawancara dengan pemangku kepentingan, studi kasus pada daerah dengan implementasi desentralisasi yang berbeda, serta analisis dokumen hukum dan kebijakan yang relevan. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan metode kuantitatif dan kualitatif sesuai dengan desain penelitian, dengan tujuan mengidentifikasi pola dan tren yang dapat memberikan wawasan lebih dalam mengenai efektivitas desentralisasi. Proses selanjutnya adalah interpretasi hasil penelitian, yang berfokus pada penyusunan rekomendasi kebijakan berdasarkan temuan empiris dan analisis akademik, sehingga dapat digunakan sebagai dasar dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Langkah terakhir adalah penyusunan laporan akhir yang mencakup keseluruhan temuan penelitian, kesimpulan yang diperoleh, serta implikasi kebijakan yang dapat diimplementasikan untuk memperbaiki mekanisme desentralisasi di Indonesia.

G. Pertimbangan Etis

Penelitian ini mempertimbangkan aspek etis secara menyeluruh dalam pengumpulan dan analisis data, terutama dalam pelaksanaan wawancara dan penggunaan dokumen kebijakan. Persetujuan informasi (*informed consent*) diperoleh dari seluruh responden sebelum mereka berpartisipasi dalam wawancara guna memastikan bahwa partisipasi mereka dilakukan secara sukarela dan sadar. Proses pengumpulan data juga dilengkapi dengan upaya menjaga kerahasiaan informasi, di mana identitas responden disamarkan untuk melindungi privasi mereka secara maksimal. Penelitian ini menerapkan standar kode etik penelitian yang ketat, terutama dalam menangani data yang berkaitan dengan evaluasi kinerja pemerintahan daerah dan praktik desentralisasi, sehingga setiap informasi yang diperoleh diperlakukan

dengan kehati-hatian yang tinggi. Pengaturan etis ini dirancang untuk menciptakan lingkungan yang aman bagi para responden dan menjamin integritas data yang dikumpulkan, yang selanjutnya mendukung validitas temuan penelitian. Langkah-langkah tersebut memberikan dasar yang kokoh bagi analisis data dan penyusunan rekomendasi kebijakan, yang bertujuan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

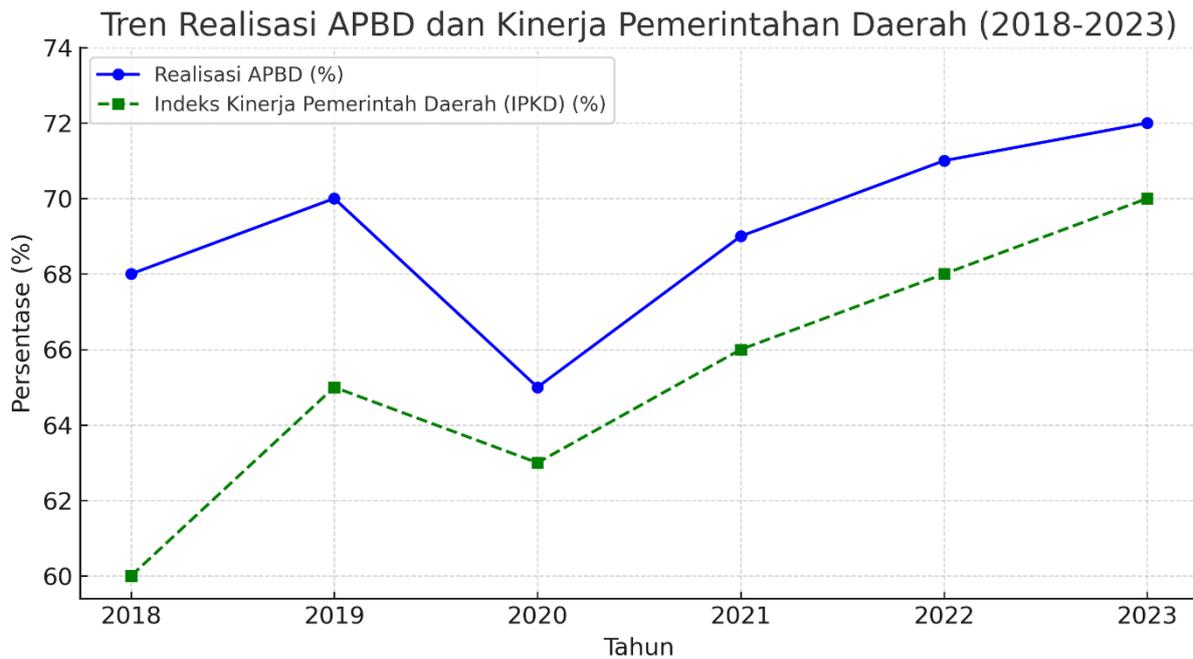
III. RESULT AND DISCUSSION

Result

A. Penyajian Data Hasil Penelitian

Penelitian ini menganalisis efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia dengan fokus pada tata kelola pemerintahan daerah, realisasi APBD, serta tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Analisis ini bertujuan untuk memahami sejauh mana kebijakan desentralisasi dapat meningkatkan kemandirian daerah dalam pengelolaan anggaran dan pelayanan publik. Data dikumpulkan melalui dokumen keuangan daerah yang mencakup laporan APBD dan alokasi anggaran, serta laporan kinerja pemerintahan daerah yang memberikan gambaran mengenai pencapaian indikator tata kelola yang telah ditetapkan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan wawancara dengan pejabat daerah dan pakar kebijakan publik guna memperoleh perspektif yang lebih mendalam terkait implementasi kebijakan serta kendala yang dihadapi di tingkat lokal. Wawancara tersebut memberikan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas tata kelola, seperti kapasitas sumber daya manusia, mekanisme pengawasan, serta keterbatasan fiskal yang dialami oleh berbagai daerah. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya menggambarkan secara komprehensif dinamika desentralisasi dan dampaknya terhadap kinerja pemerintahan daerah di Indonesia.

Gambar 1 menyajikan tren realisasi APBD dan kinerja pemerintahan daerah dari tahun 2018 hingga 2023, yang mencerminkan perkembangan dalam pengelolaan keuangan daerah selama periode tersebut. Gambar ini menunjukkan perubahan dalam persentase realisasi anggaran yang telah dialokasikan serta tingkat efektivitas pemerintah daerah dalam mengelola anggaran tersebut. Tren yang ditampilkan dalam grafik memberikan gambaran umum mengenai bagaimana pemerintah daerah mampu memanfaatkan anggaran yang tersedia untuk menjalankan program dan kebijakan yang telah dirancang. Selain itu, data yang disajikan dalam grafik dapat menjadi dasar untuk mengevaluasi seberapa baik daerah-daerah di Indonesia dalam mengoptimalkan anggaran yang diberikan oleh pemerintah pusat. Gambar ini juga menunjukkan variasi dalam kinerja setiap tahun, yang dapat dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kebijakan fiskal, kapasitas administrasi daerah, dan faktor ekonomi makro. Dengan melihat pola yang terbentuk dari tahun ke tahun, analisis lebih lanjut dapat dilakukan untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi tren realisasi APBD dan kinerja pemerintahan daerah.

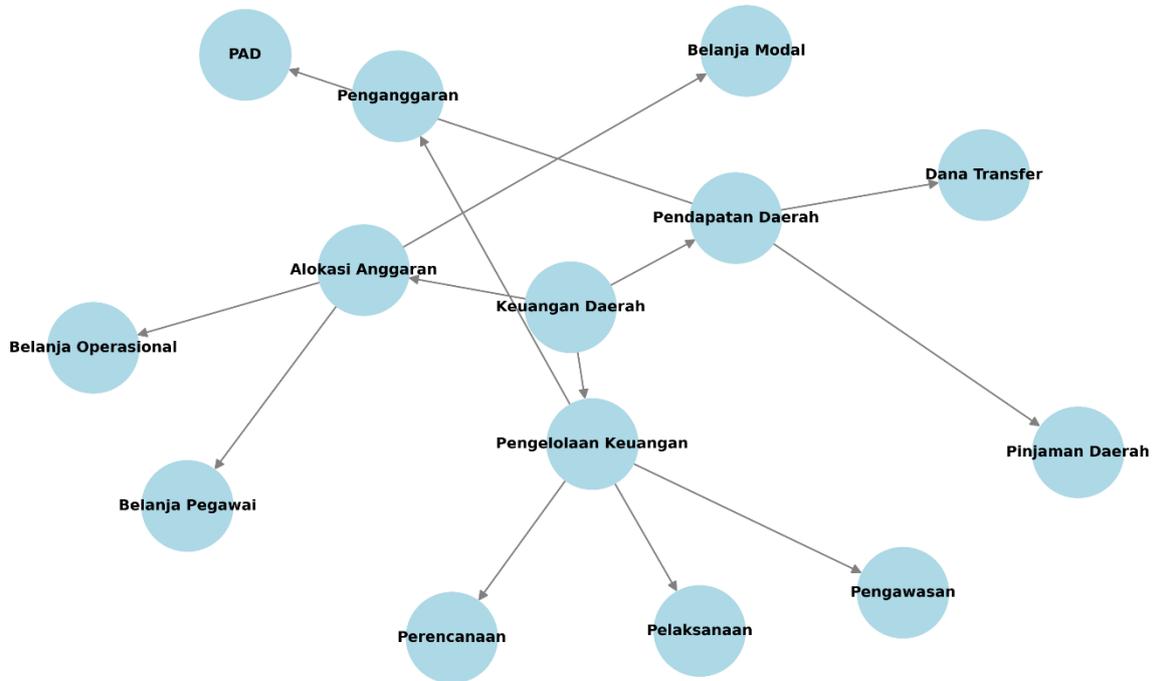


Gambar 1. Tren Realisasi APBD dan Kinerja Pemerintahan Daerah 2018–2023

Berdasarkan Gambar 1, realisasi APBD menunjukkan peningkatan bertahap dari 68% pada tahun 2018 menjadi 72% pada tahun 2023, yang mengindikasikan adanya perbaikan dalam proses penyerapan anggaran di tingkat daerah. Peningkatan ini dapat dikaitkan dengan berbagai faktor, termasuk perbaikan dalam mekanisme perencanaan dan pengelolaan anggaran, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintah daerah, serta perubahan dalam regulasi yang mendukung efektivitas penyaluran dana. Meskipun demikian, peningkatan realisasi APBD belum sepenuhnya berbanding lurus dengan peningkatan kinerja pemerintahan daerah, sebagaimana ditunjukkan oleh IPKD. Selama periode yang sama, IPKD hanya mengalami peningkatan dari 60% pada tahun 2018 menjadi 70% pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dalam optimalisasi penggunaan anggaran untuk mencapai hasil yang lebih baik. Faktor lain seperti ketimpangan fiskal antar daerah, efektivitas sistem pengawasan, serta kapasitas birokrasi dalam menjalankan program pembangunan dapat mempengaruhi hubungan antara realisasi APBD dan peningkatan kinerja daerah. Oleh karena itu, diperlukan analisis lebih lanjut untuk memahami bagaimana kebijakan desentralisasi dapat lebih efektif dalam meningkatkan keseimbangan antara penyerapan anggaran dan kualitas tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, Gambar 2 menggambarkan struktur tata kelola keuangan daerah yang efisien dengan menampilkan hubungan antara berbagai elemen yang mendukung sistem keuangan daerah. Struktur ini mencerminkan bagaimana pendapatan daerah diperoleh, bagaimana dana tersebut dikelola, serta bagaimana anggaran dialokasikan untuk berbagai sektor prioritas. Gambar ini juga membantu dalam memahami mekanisme yang diterapkan dalam pengelolaan anggaran daerah, termasuk tahapan perencanaan, penganggaran, dan pengawasan keuangan. Selain itu, struktur tata kelola yang digambarkan dalam diagram dapat memberikan wawasan mengenai peran aktor-aktor utama dalam

sistem keuangan daerah, seperti pemerintah daerah, legislatif, dan lembaga pengawas. Dengan adanya gambaran yang jelas mengenai struktur ini, pemangku kebijakan dapat menilai apakah sistem yang diterapkan sudah sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Diagram ini juga menjadi alat yang berguna dalam mengevaluasi efektivitas kebijakan fiskal daerah serta mengidentifikasi tantangan yang mungkin dihadapi dalam implementasinya.



Gambar 2. Struktur Tata Kelola Keuangan Daerah yang Efisien

Gambar 2 menunjukkan bahwa sistem tata kelola yang efektif harus mencakup sumber pendapatan daerah yang beragam, proses pengelolaan yang transparan, dan alokasi anggaran yang strategis agar dapat mendukung pembangunan daerah secara optimal. Pendapatan daerah dapat bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, PAD, serta sumber lain yang sah berdasarkan regulasi yang berlaku. Pengelolaan keuangan daerah yang transparan mencakup perencanaan yang jelas, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, serta mekanisme pengawasan yang ketat untuk mencegah penyimpangan. Selain itu, alokasi anggaran yang strategis sangat penting untuk memastikan bahwa setiap sektor mendapatkan pendanaan yang proporsional sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Meskipun demikian, penelitian ini menemukan bahwa beberapa daerah masih mengalami ketimpangan dalam penerimaan pendapatan yang berdampak pada keterbatasan dalam pembiayaan program prioritas. Selain perbedaan kapasitas fiskal antar daerah, faktor lain seperti efisiensi dalam pengelolaan anggaran dan efektivitas pengawasan juga berkontribusi terhadap variasi dalam kinerja keuangan daerah.

B. Hasil Berdasarkan Tujuan Penelitian

Hasil penelitian ini dikategorikan berdasarkan tiga tujuan utama penelitian, yang mencakup efektivitas kebijakan desentralisasi dalam meningkatkan kinerja pemerintahan daerah, tantangan dalam

implementasi otonomi daerah, serta rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah. Dalam konteks efektivitas kebijakan desentralisasi, penelitian ini menemukan bahwa desentralisasi telah meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola anggaran, terutama dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Meskipun demikian, efektivitas pelaksanaannya masih menunjukkan variasi yang cukup signifikan di berbagai wilayah, bergantung pada kesiapan pemerintah daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan administratif. Beberapa daerah telah berhasil menerapkan prinsip transparansi dalam pengelolaan anggaran dengan memanfaatkan teknologi informasi dan mekanisme pengawasan publik. Sebaliknya, daerah lain masih menghadapi kendala berupa lemahnya sistem pengawasan internal serta adanya praktik korupsi dalam alokasi dan penggunaan dana publik. Studi kasus di Jawa Tengah menunjukkan bahwa penerapan tata kelola fiskal yang baik, termasuk perencanaan anggaran yang berbasis kinerja dan mekanisme evaluasi yang ketat, mampu meningkatkan efektivitas pembangunan daerah serta mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan.

Tantangan dalam implementasi otonomi daerah mencakup berbagai faktor yang mempengaruhi efektivitas kebijakan desentralisasi, termasuk ketimpangan fiskal, korupsi dalam pengelolaan APBD, serta kapasitas sumber daya manusia yang masih terbatas di tingkat daerah. Ketimpangan fiskal menjadi salah satu tantangan utama, di mana beberapa daerah masih sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat, terutama bagi daerah yang memiliki PAD yang rendah. Ketergantungan yang tinggi terhadap dana pusat dapat membatasi fleksibilitas daerah dalam menentukan prioritas pembangunan serta memperlambat proses pengambilan keputusan yang berbasis kebutuhan lokal. Selain itu, korupsi dalam pengelolaan APBD tetap menjadi masalah yang serius, dengan data menunjukkan bahwa kasus korupsi di tingkat daerah terus meningkat, tercatat sebanyak 116 kasus pada tahun 2020. Faktor lain yang turut mempengaruhi efektivitas desentralisasi adalah kapasitas sumber daya manusia yang masih lemah, terutama dalam aspek perencanaan dan pengelolaan keuangan daerah. Banyak daerah masih mengalami kekurangan tenaga ahli yang memiliki kompetensi dalam administrasi publik, manajemen keuangan, serta perancangan kebijakan berbasis data. Tabel 1 merangkum berbagai faktor yang mendukung maupun menghambat efektivitas desentralisasi di Indonesia, termasuk aspek kelembagaan, regulasi, serta implementasi kebijakan yang berperan dalam keberhasilan atau kegagalan tata kelola pemerintahan daerah.

Tabel 4. Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Desentralisasi

Kategori	Faktor	Dampak
Faktor Pendukung	Peningkatan Otonomi Daerah	Meningkatkan fleksibilitas daerah dalam mengambil kebijakan strategis.
	Mekanisme Pengawasan Publik	Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran.
	Penggunaan Teknologi dalam Tata Kelola	Mempercepat proses administrasi dan meningkatkan efisiensi pengelolaan keuangan daerah.
Faktor Penghambat	Ketimpangan Fiskal	Meningkatkan ketergantungan daerah pada dana pusat, menghambat kemandirian fiskal.
	Korupsi dalam Pengelolaan APBD	Mengurangi efektivitas pembangunan daerah dan memperburuk kepercayaan publik terhadap pemerintah.

	Kurangnya Kapasitas SDM	Menurunkan kualitas kebijakan dan efektivitas pengelolaan daerah.
--	-------------------------	---

Rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi tata kelola pemerintahan daerah mencakup berbagai langkah strategis yang dapat diterapkan guna memperbaiki sistem pengelolaan keuangan daerah. Salah satu langkah yang dapat dilakukan adalah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan APBD melalui penerapan sistem pengawasan berbasis teknologi, seperti e-governance, yang memungkinkan pemantauan real-time terhadap alokasi dan penggunaan anggaran daerah. Penerapan teknologi dalam pengelolaan anggaran dapat membantu mengurangi risiko penyalahgunaan keuangan serta meningkatkan akses publik terhadap informasi fiskal, sehingga masyarakat dapat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi kebijakan pemerintah daerah. Selain itu, kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah perlu diperkuat melalui program pelatihan dan pendidikan yang berfokus pada tata kelola keuangan daerah, manajemen kebijakan publik, serta peningkatan kompetensi teknis dalam perencanaan dan penganggaran. Program pengembangan SDM ini harus disertai dengan sistem evaluasi yang dapat memastikan bahwa setiap aparatur pemerintahan memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan tata kelola modern. Langkah lain yang perlu dipertimbangkan adalah penyusunan kebijakan fiskal yang lebih adil, sehingga daerah dengan tingkat PAD yang rendah tetap memiliki akses terhadap pendanaan yang memadai untuk pembangunan. Kebijakan fiskal yang lebih proporsional dapat membantu mengurangi ketimpangan antara daerah maju dan daerah tertinggal, serta memastikan bahwa seluruh daerah memiliki kesempatan yang setara dalam mengembangkan potensi ekonominya melalui kebijakan desentralisasi yang efektif.

C. Hasil Uji Statistik atau Analisis Data

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dan kualitatif untuk menganalisis efektivitas desentralisasi dengan mengombinasikan data statistik dan wawasan dari studi kasus yang dilakukan di beberapa daerah. Salah satu analisis yang dilakukan adalah menguji korelasi antara realisasi APBD dan IPKD, yang menunjukkan hubungan positif dengan nilai korelasi sebesar $r = 0.78$ ($p < 0.05$). Hasil ini mengindikasikan bahwa daerah yang memiliki tingkat realisasi APBD yang lebih tinggi cenderung menunjukkan kinerja pemerintahan yang lebih baik dalam berbagai aspek tata kelola. Meskipun demikian, implementasi desentralisasi masih menunjukkan variasi dalam efektivitasnya di berbagai daerah, sebagaimana terlihat dari temuan bahwa hanya 35% daerah yang memiliki tata kelola keuangan yang efektif, sementara 45% daerah masih menghadapi kendala dalam pengelolaan anggaran. Faktor ketimpangan fiskal juga menjadi salah satu tantangan utama dalam implementasi desentralisasi, di mana daerah dengan PAD yang rendah cenderung memiliki IPKD yang lebih rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh korelasi $r = 0.65$ ($p < 0.05$). Ketergantungan daerah dengan PAD rendah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat berpengaruh terhadap fleksibilitas dalam pengambilan kebijakan, yang pada akhirnya dapat membatasi kemampuan daerah dalam mengoptimalkan kinerja tata kelola mereka secara mandiri.

D. Hasil Utama yang Signifikan

Berdasarkan hasil penelitian, terdapat beberapa temuan utama yang menunjukkan dinamika efektivitas kebijakan desentralisasi di Indonesia dalam berbagai aspek tata kelola pemerintahan daerah. Realisasi APBD mengalami peningkatan setiap tahunnya, yang mencerminkan adanya perbaikan dalam mekanisme pengelolaan anggaran di tingkat daerah. Namun, efektivitas desentralisasi masih menunjukkan variasi yang cukup besar, di mana beberapa daerah mampu mengelola anggaran secara efisien, sementara daerah lainnya masih menghadapi kendala dalam penyerapan dan alokasi dana. Salah satu tantangan utama dalam implementasi kebijakan ini adalah ketimpangan fiskal, yang menyebabkan beberapa daerah sangat bergantung pada dana transfer dari pemerintah pusat untuk membiayai program pembangunan dan operasional daerah. Selain itu, permasalahan korupsi dalam pengelolaan APBD masih menjadi isu yang signifikan, dengan banyaknya kasus penyalahgunaan anggaran yang berdampak pada rendahnya efektivitas pembangunan daerah. Kapasitas sumber daya manusia yang belum optimal serta lemahnya sistem pengawasan turut berkontribusi terhadap lambatnya pelaksanaan kebijakan desentralisasi, terutama dalam memastikan bahwa anggaran digunakan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Perbandingan dengan negara lain menunjukkan bahwa Indonesia masih menghadapi tantangan dalam mewujudkan sistem pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan efisien, sehingga diperlukan reformasi kebijakan yang lebih komprehensif untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah secara keseluruhan.

Discussion

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia telah memberikan dampak yang beragam terhadap efektivitas tata kelola pemerintahan daerah. Data yang dianalisis menunjukkan bahwa tingkat realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) mengalami peningkatan dari 68% pada tahun 2018 menjadi 72% pada tahun 2023. Namun, meskipun terdapat peningkatan dalam kapasitas fiskal daerah, efektivitas pengelolaan anggaran belum sepenuhnya optimal, sebagaimana ditunjukkan oleh tingkat kepuasan publik yang hanya meningkat dari 55% menjadi 68% pada periode yang sama. Temuan ini mengindikasikan bahwa keberhasilan desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah sangat bergantung pada kesiapan institusi daerah dalam mengelola sumber daya keuangan dan administratif. Meskipun sebagian daerah telah berhasil menerapkan kebijakan fiskal yang transparan dan akuntabel, masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam perencanaan dan pengelolaan anggaran. Selain itu, kasus korupsi dalam pemerintahan daerah terus meningkat, dengan jumlah kasus mencapai 160 kasus pada tahun 2023, yang menunjukkan bahwa desentralisasi belum sepenuhnya berhasil mengurangi risiko penyalahgunaan wewenang di tingkat daerah.

Hasil penelitian ini konsisten dengan studi yang dilakukan oleh (Del Campo & Reinón, 2023), yang menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan daerah jika didukung oleh kapasitas administratif yang kuat. Selain itu, penelitian oleh (Setiawan et al., 2022) juga menegaskan bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan kapasitas fiskal daerah dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antarwilayah. Temuan ini diperkuat oleh studi (Tang et al., 2024),

yang menemukan bahwa daerah dengan ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap dana pusat cenderung memiliki tingkat efektivitas pengelolaan anggaran yang rendah. Namun, temuan penelitian ini berbeda dengan studi oleh (Shrestha et al., 2023), yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dalam tata kelola pemerintahan. Penelitian ini justru menemukan bahwa rendahnya literasi fiskal masyarakat menyebabkan tingkat pengawasan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah masih rendah, yang berdampak pada lemahnya transparansi dan akuntabilitas. Selain itu, penelitian oleh (Wadipalapa et al., 2024) menunjukkan bahwa desentralisasi di Indonesia cenderung memperkuat oligarki lokal, sedangkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak desentralisasi sangat bervariasi tergantung pada kapasitas masing-masing daerah dalam mengelola sumber daya yang dimilikinya.

Salah satu hasil yang tidak sesuai dengan ekspektasi adalah bahwa meskipun desentralisasi bertujuan untuk meningkatkan efisiensi pengelolaan anggaran daerah, peningkatan realisasi APBD tidak selalu berbanding lurus dengan peningkatan kualitas layanan publik. Hal ini berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menyatakan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan efektivitas kebijakan publik melalui peningkatan otonomi daerah. Salah satu faktor yang dapat menjelaskan fenomena ini adalah bahwa alokasi anggaran yang lebih tinggi tidak selalu disertai dengan peningkatan kapasitas administratif dalam mengelola dana tersebut, sehingga efektivitas penggunaannya tetap rendah. Selain itu, meskipun teori desentralisasi menyatakan bahwa kebijakan ini dapat meningkatkan daya saing ekonomi daerah, penelitian ini menemukan bahwa ketimpangan fiskal masih menjadi hambatan utama bagi daerah dengan PAD yang rendah. Temuan ini bertentangan dengan studi (Sunmola & Burgess, 2022), yang menunjukkan bahwa desentralisasi dapat meningkatkan inovasi dalam tata kelola daerah jika disertai dengan penguatan regulasi dan transparansi. Dalam konteks Indonesia, penelitian ini menemukan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan kurangnya koordinasi antar pemerintah pusat dan daerah masih menjadi kendala dalam optimalisasi kebijakan desentralisasi.

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas desentralisasi dalam meningkatkan tata kelola pemerintahan daerah. Temuan ini menegaskan bahwa keberhasilan desentralisasi tidak hanya bergantung pada kebijakan fiskal yang diterapkan, tetapi juga pada kapasitas institusi daerah dalam mengelola sumber daya yang tersedia. Selain itu, penelitian ini memperkuat teori bahwa desentralisasi yang tidak disertai dengan penguatan mekanisme pengawasan dapat memperburuk praktik korupsi di tingkat daerah. Secara praktis, hasil penelitian ini menekankan perlunya reformasi dalam kebijakan desentralisasi di Indonesia untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan anggaran daerah. Salah satu rekomendasi utama adalah penguatan kapasitas sumber daya manusia di pemerintahan daerah melalui program pelatihan yang berfokus pada perencanaan dan manajemen keuangan daerah. Selain itu, penggunaan teknologi dalam tata kelola keuangan daerah perlu ditingkatkan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, misalnya melalui penerapan sistem e-budgeting yang memungkinkan masyarakat untuk mengakses informasi

mengenai alokasi dan penggunaan anggaran daerah. Selain itu, penelitian ini menyoroti pentingnya mekanisme insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan, seperti penghargaan bagi daerah yang memiliki tingkat transparansi anggaran yang tinggi. Langkah lain yang perlu dipertimbangkan adalah penguatan sistem pengawasan internal di tingkat daerah untuk memastikan bahwa penggunaan anggaran dilakukan sesuai dengan prinsip akuntabilitas dan efisiensi.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam rangka memahami ruang lingkup dan implikasi temuan yang dihasilkan. Salah satu keterbatasan utama adalah cakupan penelitian yang masih terbatas pada analisis kebijakan desentralisasi di Indonesia, tanpa adanya perbandingan dengan negara lain yang telah menerapkan kebijakan serupa. Keterbatasan ini dapat membatasi pemahaman mengenai bagaimana faktor kontekstual yang berbeda memengaruhi efektivitas desentralisasi dalam berbagai sistem pemerintahan. Selain itu, jumlah sampel dalam penelitian ini masih terbatas, terutama dalam aspek wawancara dengan pejabat daerah dan pakar kebijakan publik, sehingga dapat berpengaruh terhadap tingkat generalisasi temuan yang diperoleh. Keterbatasan lainnya terletak pada fokus penelitian yang lebih menitikberatkan aspek fiskal dan administratif, sehingga belum memberikan analisis yang komprehensif mengenai bagaimana dinamika sosial dan politik turut berperan dalam keberhasilan implementasi desentralisasi. Aspek sosial, seperti penerimaan masyarakat terhadap kebijakan ini, serta faktor politik, seperti dinamika antarlevel pemerintahan, seharusnya mendapatkan perhatian lebih lanjut guna memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas desentralisasi di Indonesia.

Berdasarkan keterbatasan yang telah diidentifikasi, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi bagaimana kebijakan desentralisasi di negara lain dapat dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan efektivitas tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia. Studi mendatang dapat mengadopsi pendekatan komparatif yang membandingkan implementasi kebijakan desentralisasi di berbagai negara dengan karakteristik sistem pemerintahan yang berbeda guna memperoleh wawasan mengenai praktik terbaik yang dapat diterapkan di Indonesia. Selain itu, penelitian lanjutan dapat lebih fokus pada analisis kuantitatif mengenai dampak desentralisasi terhadap pertumbuhan ekonomi daerah serta mengkaji sejauh mana faktor politik dan sosial berkontribusi terhadap keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, studi di masa depan dapat memberikan pemahaman yang lebih empiris mengenai efektivitas desentralisasi berdasarkan data yang lebih luas dan representatif.

Penelitian lebih lanjut juga dapat mengkaji bagaimana mekanisme insentif bagi daerah yang berhasil meningkatkan tata kelola keuangan dapat diterapkan dalam konteks Indonesia, baik dari segi kebijakan fiskal maupun reformasi administrasi publik. Studi ini dapat mencermati bagaimana insentif berbasis kinerja dapat mendorong peningkatan akuntabilitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, penelitian mendatang dapat mengeksplorasi pemanfaatan teknologi digital dalam meningkatkan transparansi anggaran daerah serta memperkuat partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan. Penggunaan teknologi informasi yang lebih terintegrasi dapat menjadi salah

satu solusi untuk memperbaiki mekanisme pengawasan dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan daerah. Kajian-kajian ini diharapkan dapat memperkaya literatur mengenai desentralisasi serta memberikan rekomendasi yang lebih aplikatif dalam upaya memperkuat tata kelola pemerintahan daerah di Indonesia.

IV. CONCLUSION

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa desentralisasi telah memberikan dampak positif bagi pemerintahan daerah, terutama dalam meningkatkan kapasitas daerah dalam mengelola urusan pemerintahan secara lebih mandiri. Meskipun demikian, masih terdapat berbagai tantangan yang menghambat efektivitas kebijakan ini, seperti ketimpangan fiskal antarwilayah, tingkat korupsi yang masih tinggi, serta keterbatasan kapasitas aparatur daerah dalam menjalankan fungsi administratif dan pelayanan publik. Faktor-faktor ini menunjukkan bahwa implementasi desentralisasi belum sepenuhnya optimal dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang lebih komprehensif untuk mengatasi berbagai hambatan tersebut guna meningkatkan keberhasilan desentralisasi di Indonesia. Upaya perbaikan dapat difokuskan pada reformasi kebijakan yang lebih konkret, penguatan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah, serta pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung efisiensi birokrasi dan meningkatkan partisipasi publik. Dengan pendekatan yang lebih sistematis dan berbasis bukti, desentralisasi diharapkan dapat menjadi instrumen yang lebih efektif dalam mendorong pemerataan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Berdasarkan temuan penelitian ini, studi di masa depan dapat lebih mendalam dalam mengkaji strategi reformasi kebijakan yang diperlukan untuk meningkatkan efektivitas desentralisasi di Indonesia. Salah satu aspek yang dapat diteliti lebih lanjut adalah bagaimana desain kebijakan fiskal dapat disesuaikan untuk mengurangi ketimpangan pendapatan antarwilayah serta mendorong alokasi anggaran yang lebih adil dan proporsional. Selain itu, penelitian selanjutnya dapat mengeksplorasi lebih jauh bagaimana reformasi tata kelola pemerintahan daerah dapat dilakukan guna menekan tingkat korupsi dan meningkatkan akuntabilitas aparatur daerah dalam pengelolaan keuangan publik. Studi yang lebih spesifik mengenai mekanisme insentif dan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah juga dapat menjadi fokus penelitian guna memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih berbasis data empiris.

Selain itu, penelitian masa depan dapat mengkaji lebih dalam peran transparansi dan inovasi digital dalam meningkatkan efisiensi sistem pemerintahan daerah. Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan administrasi publik, perencanaan anggaran, serta keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan dapat menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi berbagai kendala yang dihadapi dalam desentralisasi. Kajian yang lebih sistematis mengenai penerapan teknologi digital dalam tata kelola pemerintahan daerah diharapkan dapat memberikan wawasan baru mengenai strategi optimal yang dapat diterapkan dalam konteks otonomi daerah di Indonesia. Dengan demikian, penelitian

selanjutnya dapat memberikan kontribusi yang lebih luas dalam memperkuat model desentralisasi yang lebih inklusif, transparan, dan berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

REFERENCES

- Annahar, N., Widianingsih, I., Muhtar, E. A., & Paskarina, C. (2023). The Road to Inclusive Decentralized Village Governance in Indonesia. *Sustainability*, *15*(11), 323. <https://doi.org/10.3390/su15118616>
- Aritenang, A. F., & Chandramidi, A. N. (2022). The Spatial Effects of Fiscal Decentralization on Regional Convergence: The Case of Regions in Indonesia. *GeoJournal*, *88*(2), 2011–2030. <https://doi.org/10.1007/s10708-022-10724-2>
- Balisany, W., Özgit, H., & Rjoub, H. (2022). The Nexus among Good E-Governance Practice, Decentralization, and Public Administration for Sustainable Local Development. *Discrete Dynamics in Nature and Society*, *2022*(1), 9886372. <https://doi.org/10.1155/2022/9886372>
- Del Campo, E., & Reinón, M. S. (2023). Decentralisation or Recentralisation in Bolivia? Autonomous Territorial Entities and Intergovernmental Relations in a Decentralised State. *Public Organization Review*, *23*(3), 1001–1016. <https://doi.org/10.1007/s11115-022-00653-6>
- Digdowniseiso, K., Murshed, S. M., & Bergh, S. I. (2022). How Effective Is Fiscal Decentralization for Inequality Reduction in Developing Countries? *Sustainability*, *14*(1), 505. <https://doi.org/10.3390/su14010505>
- Engdaw, B. (2022). The Effect of Administrative Decentralization on Quality Public Service Delivery in Bahir Dar City Administration: The Case of Belay Zeleke Sub-City. *Cogent Social Sciences*, *8*(1), 2004675. <https://doi.org/10.1080/23311886.2021.2004675>
- Faguet, J. (2022). The Incoherence of Institutional Reform : Decentralization as a Structural Solution to Immediate Political Needs. *Studies in Comparative International Development*, *57*(1), 82–109. <https://doi.org/10.1007/s12116-021-09347-4>
- Getahun, K. T., Bilal, A. I., & Cho, D. J. (2025). Public Sector Pharmaceutical Distribution System and Its Challenges: A Case of a Central Ethiopian Pharmaceuticals Supply Service and Selected Branches. *BMC Health Services Research*, *25*(1), 1–12. <https://doi.org/10.1186/s12913-025-12404-6>
- Hung, N. T., & Thanh, S. D. (2022). Fiscal Decentralization, Economic Growth, and Human Development: Empirical Evidence. *Cogent Economics and Finance*, *10*(1), 2109279. <https://doi.org/10.1080/23322039.2022.2109279>
- Kalogiannidis, S., Kalfas, D., Papaevangelou, O., Chatzitheodoridis, F., Katsetsiadou, K. N., & Lekkas, E. (2024). Integration of Climate Change Strategies into Policy and Planning for Regional Development: A Case Study of Greece. *Land*, *13*(3), 1–23. <https://doi.org/10.3390/land13030268>
- Kesale, A. M., Mahonge, C., & Muhanga, M. (2022). Effects of Decentralization on the Functionality of Health Facility Governing Committees in Lower and Middle- Income Countries: A Systematic Literature Review. *Global Health Action*, *15*(1), 2074662. <https://doi.org/10.1080/16549716.2022.2074662>
- Li, H., & Guo, Y. (2022). Performance Management of University Financial Budget Execution Relying on Comprehensive Budget Management Strengthening Model. *Advances in Multimedia*, *2022*(1), 4758609. <https://doi.org/10.1155/2022/4758609>
- Mendez, C., & Bachtler, J. (2024). The Quality of Government and Administrative Performance: Explaining Cohesion Policy Compliance, Absorption and Achievements Across EU Regions. *Regional Studies*, *58*(4), 690–703. <https://doi.org/10.1080/00343404.2022.2083593>

- Miranda-Lescano, R., Muinelo-Gallo, L., & Roca-Sagalés, O. (2024). Redistributive Efficiency of Fiscal Policy: The Role of Decentralization and Good Governance. *Regional & Federal Studies*, 34(2), 189–216. <https://doi.org/10.1080/13597566.2022.2092844>
- Onofrei, M., Oprea, F., Iațu, C., Cojocariu, L., & Anton, S. G. (2022). Fiscal Decentralization, Good Governance and Regional Development—Empirical Evidence in the European Context. *Sustainability*, 14(12), 7093. <https://doi.org/10.3390/su14127093>
- Rodríguez-pose, A. (2022). The Economic Returns of Decentralisation : Government Quality and the Role of Space. *Environment and Planning A: Economy and Space*, 54(8), 1604–1622. <https://doi.org/10.1177/0308518x221118913>
- Savitri, E., & Tjenreng, M. B. Z. (2025). Berkah atau Bencana? Desentralisasi Sumber Daya Alam dan Nasib Kesejahteraan Masyarakat: Sebuah Kajian Literatur. *Journal of Management*, 8(1), 986–989. <https://doi.org/10.37531/yum.v8i1.8205>
- Setiawan, A., Tjiptoherijanto, P., Mahi, B. R., & Khoirunurrofik, K. (2022). The Impact of Local Government Capacity on Public Service Delivery: Lessons Learned from Decentralized Indonesia. *Economies*, 10(12), 1–13. <https://doi.org/10.3390/economies10120323>
- Shrestha, K., Martinez-Vazquez, J., & Hankla, C. (2023). Political Decentralization and Corruption: Exploring the Conditional Role of Parties. *Economics & Politics*, 35(1), 411–439. <https://doi.org/10.1111/ecpo.12222>
- Silitonga, M. S., Wittek, R., Snijders, T. A. B., & Heyse, L. (2023). Democratizing Corruption: A Role Structure Analysis of Indonesia’s “Big Bang” Decentralization. *Applied Network Science*, 8(1), 8. <https://doi.org/10.1007/s41109-023-00535-w>
- Styrin, E., Mossberger, K., & Zhulin, A. (2022). Government as a Platform: Intergovernmental Participation for Public Services in the Russian Federation. *Government Information Quarterly*, 39(1), 101627. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101627>
- Sunmola, F., & Burgess, P. (2022). Transparency by Design for Blockchain-Based Supply Chains. *Procedia Computer Science*, 217, 1256–1265. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2022.12.324>
- Tang, Z., Zhang, Z., & Deng, W. (2024). Government Environmental Expenditure, Budget Management, and Regional Carbon Emissions: Provincial Panel Data from China. *Sustainability*, 16(15), 6707. <https://doi.org/10.3390/su16156707>
- Wadipalapa, R. P., Katharina, R., Nainggolan, P. P., Aminah, S., Apriani, T., Ma’rifah, D., & Anisah, A. L. (2024). An Ambitious Artificial Intelligence Policy in a Decentralised Governance System: Evidence From Indonesia. *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 43(1), 65–93. <https://doi.org/10.1177/18681034231226393>
- Xia, J., Yi, R., Li, M., Zhan, X., & Song, L. (2022). A Study on the Impact of Fiscal Decentralization on Carbon Emissions with U-Shape and Regulatory Effect. *Frontiers in Environmental Science*, 10, 1–14. <https://doi.org/10.3389/fenvs.2022.964327>
- Xu, T. (2022). The Selective Centralization in Decentralization : China ’ s Environmental Vertical Management Reform with a Case Study in Hebei Province. *International Journal of Water Resources Development*, 38(4), 634–657. <https://doi.org/10.1080/07900627.2021.1909542>
- Yokogawa, K. (2024). Russia Lacks the Financial Resources to Improve Living Standards in the Arctic : A Case of the Sakha Republic. *Polar Science*, 41(484), 101051. <https://doi.org/10.1016/j.polar.2024.101051>